

POLITIK PENYETARAAN DAYAH DI ACEH

Almuhajir

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe
Email: abujaadalhaq@yahoo.com

Abstrak

Hubungan antara lembaga pendidikan dan politik bukan sekadar hubungan saling mempengaruhi, tetapi juga hubungan fungsional. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara atau daerah. Dayah sebagai lembaga pendidikan tertua di Aceh, telah memainkan perannya dalam membangun negeri ini, mengalami pasang surut dalam legalitasnya. Pasca Tsunami dan MOU Helsinki, dayah “meminta hak” agar tidak lagi dianak tirikan dengan lembaga pendidikan lain yang ada di Aceh. Hasil usahanya, Dayah akhirnya mendapatkan legalitas dari Pemerintah Aceh sebagai lembaga Formal yang disejajarkan dengan pendidikan formal lainnya, serta alumninya bisa diterima di beberapa instansi pemerintah dan swasta, walaupun dengan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh yang dibentuk lewat Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh (BPPDA). Fenomena sekarang telah menunjukkan bahwa Dayah dan Pemerintah Aceh telah memiliki simbiosis mutualisme antara keduanya.

Kata Kunci: *Politik; Dayah; Aceh*

Abstract

The relationship between educational institutions and politics is not merely a mutual relationship influence, but also a functional relationship. Institutions and educational processes play important role in structuring the people political behavior in a country or a region. *Dayah* as the oldest educational institutions in Aceh, which has played a great role, has ups and downs in its legality. After Tsunami and the Helsinki MoU, *dayah* "ask the right" to not be regarded anymore as stepchildren of any other educational institutions. Due to the struggling, *dayah* finally get the Acehnese government legality as an formal institution which is equated with other formal educations, and it alumnus could be accepted in some government and private institutions with some requirements be fulfilled that have been decided by the Acehnese government which is formed through the (BPPDA), The Agency of Dayah Educational Development. Nowadays phenomenon shows that between *dayah* and the Acehnese government have already have symbiotic mutualism.

Keywords: *Politics; Dayah; Aceh*

مستخلص

إن العلاقة بين المؤسسات التعليمية والسياسة ليست مجرد علاقة التأثير المتبادل، ولكن أيضا علاقة وظيفية. المؤسسات والعمليات التعليمية تلعب دورا هاما في تشكيل السلوك السياسي للشعب في بلد أو منطقة. المدارس الإسلامية الداخلية أو ما تسمى بالداية كما أقدم المؤسسات التعليمية في آتشيه، قد لعبت دورا في بناء هذا البلد، ويكون

POLITIK PENYETERAAN DAYAH DI ACEH

الصعود والهبوط في شرعيتها. تسونامي ومذكرة تفاهم هلسنكي، المدارس الداخلية "، مطالبا بحق" لم يعد أولاد الزوج وحده في الأسرة مع المؤسسات التعليمية الأخرى في اتشيه. نتائج العمليات، والصعود أخيرا الحصول على شرعية حكومة آتشيه كمؤسسة رسمية تتماشى مع التعليم الرسمي الآخرين، فضلا عن خريجي يمكن أن يكون مقبولا في بعض المؤسسات الحكومية والخاصة، على الرغم من بعض المتطلبات التي تم وضعها من قبل حكومة اقليم اتشيه التي تم تشكيلها من خلال وكالة تطوير التعليم في المدارس الإسلامية الداخلية اتشيه (BPPDA) وقد تم الآن أثبتت هذه الظاهرة أن مدرسة داخلية وحكومة آتشيه كان له تبادل المنافع والمصالح التكافلية بينهما.

الكلمات الرئيسية: السياسة، مدرسة داخلية، اتشيه

A. Pendahuluan

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik disetiap negara, baik negara maju maupun berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal keduanya bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan.¹

Pemikiran di atas menegaskan betapa hubungan pendidikan dan politik dalam skala makro yakni negara ternyata tidak bisa dipisahkan. Berangkat dari konsep makro tersebut di atas, ternyata untuk tingkat mikro juga mengalami hal yang sama di mana hubungan pendidikan dan politik di tingkat daerah saling mempengaruhi. Hal ini terbukti dengan kebijakan politik dari pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh "atmosfir" pendidikan suatu daerah. Aceh² misalnya, seiring perkembangan waktu dan IPTEK, lembaga pendidikan tertua di Aceh yakni *Dayah*³ telah

¹Muhammad Sirozi, *Politik Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 1.

²Aceh adalah sebuah daerah yang terletak di ujung pulau sumatera paling barat Indonesia. Daerah ini berbatasan dengan teluk benggala disebelah utara, samudra hindia disebelah barat, selat malaka disebelah timur, dan sumatera utara di sebelah tenggara dan selatan. Lihat, Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Pendidikan di Aceh dari Masa ke Masa* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi NAD, 2009), 5.

³*Dayah*, demikian sebutan masyarakat Aceh kepada Pesantren, masyarakat lebih mengenal istilah *Dayah* ketimbang Pesantren. Penyebutan nama *Dayah* untuk pesantren merupakan sebutan "warisan" yang telah ditinggalkan sejak dulu. *Dayah* di Aceh dikelompokkan secara umum ada dua yaitu *Dayah* Tradisional (Salafiyah) dan *Dayah* Terpadu. Dalam tulisan ini *Dayah* yang menjadi

melakukan “invasi” ke berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh, sehingga banyak alumni *Dayah* yang mengisi tempat-tempat strategis di instansi pemerintahan maupun lembaga-lembaga swasta.

Eksistensi *Dayah* khususnya di Aceh menurut perkiraan James T. Siegel sebagaimana yang dikutip oleh Hamdiah telah ada semenjak kesultanan dan turut mewarnai kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan memainkan fungsi sosial, khususnya dalam disiplin ilmu agama. Masyarakat Aceh terutama anak-anak mudanya kebanyakan *meudagang* (nyantri), merantau untuk mendapatkan bekal pengetahuan.⁴

Dayah di Aceh telah mampu menunjukkan partisipasi aktifnya bersama-sama elemen masyarakat termasuk pemerintah dalam menyukseskan program-program pembangunan, terlebih dalam hal kehidupan keagamaan dan pencerdasan anak bangsa. Pergulatan literatur sejarah dan dinamika sosial secara dialektik membuat *Dayah* mempunyai kesadaran dan konsen untuk ikut mengawasi proses perjalanan bangsa sesuai dengan cita-cita agama dan masyarakat secara universal.⁵

Dalam lintasan sejarah, eksistensi *Dayah* menjadi istimewa karena ia menjadi pendidikan alternatif (penyeimbang) dari pendidikan yang dikembangkan oleh kaum kolonial (Barat) yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. *Dayah* menjadi tempat berlabuh umat Islam yang tersingkir secara budaya (pendidikan) akibat perlakuan diskriminatif penjajah. Kini perkembangan *Dayah* dengan sistem pendidikannya mampu mensejajarkan diri dengan pendidikan lain pada umumnya. Kenyataan ini menjadi aset yang luar biasa baik bagi perkembangan pendidikan *Dayah* maupun pendidikan Aceh bahkan nasional pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Dari sana diharapkan tumbuh kaum intelektual yang berwawasan luas dengan landasan spiritual yang kuat.

Pendidikan pada dasarnya selalu bersinggungan dengan “kekuasaan” dalam hal ini kekuasaan bisa dipahami sebagai salah satu aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan persaingan antar kelompok dalam memperebutkan pengaruh baik di luar maupun di dalam kawasan pendidikan itu sendiri, serta bisa dimengerti sebagai kekuasaan negara yang wilayah jangkauannya mencakup banyak bidang

penekanan pembahasannya adalah *Dayah* Salafiyah. Sedangkan *Dayah* modern/terpadu sudah dikategorikan dalam lembaga formal, disana ada MA dan MTs, sehingga *Dayah* modern/terpadu tidak lagi menjadi “polemik” bagi masyarakat dan Pemerintah Aceh.

⁴Hamdiah M. Latif, “Tradisi dan Vitalitas *Dayah* (Kesempatan dan Tantangan)”, *Didaktika*, 8 (2, 2007), 1.

⁵Mashuri, “Dinamika Sistem Pendidikan Islam di *Dayah*”, *Didaktika*, 13 (2, 2013), 263.

POLITIK PENYETERAAN DAYAH DI ACEH

termasuk kekuasaan negara dalam pendidikan.⁶ Persinggungan antara keduanya tersebut menurut Edward Steven dan George H Wood, sebenarnya bersumber dari adanya “*system of beliefs*” yang sama. Dengan “*system of beliefs*” ini suatu cita-cita yang ideal masyarakat dan pendidikan hendak dibangun, dalam pengertian sederhana “*system of beliefs*” ini disebut dengan *ideologi*.⁷

Dayah sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam sangat berperan langsung dalam mendesign perubahan masyarakat, menjadi tumpuan dan solusi bagi setiap situasi kondisi yang melanda masyarakat sekitarnya. Indikator dari argumen ini dapat dilihat dari perubahan tujuan pendidikan, komponen-komponen kurikulum dan pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap keadaan masyarakat Aceh dalam sejarah.⁸

Dalam menjalankan operasionalnya, *Dayah* mengalami berbagai problematika, mulai dari kepemimpinan *Dayah*, santri, tenaga pendidik, kurikulum, keuangan, sarana dan prasarana, sampai dengan masalah kelulusan santrinya.⁹ *Dayah* sebagai lembaga pendidikan tradisional memiliki asumsi miring dalam sebahagian pola pikir masyarakat Aceh, asumsi miring itu adalah adanya anggapan bahwa *jak beut hana masa depan* (menuntut ilmu di *Dayah* tidak memiliki prospek masa depan). Asumsi ini bermakna bahwa *Dayah* sebagai lembaga pendidikan belum mampu memberikan jaminan masa depan yang cerah kepada para alumninya, seperti halnya lembaga pendidikan lain semisal Perguruan Tinggi.

Pada bagian lain, *Dayah* dijadikan “bengkel” moral anak-anak yang memiliki akhlak yang tidak baik. Sehingga asumsi sebagian masyarakat jika ada orang tua yang mengantarkan anaknya ke *Dayah*, berarti anaknya itu bermasalah (akhlak). Ditambah lagi kesenjangan bantuan dana pendidikan yang hanya diperuntukkan kepada lembaga formal saja. *Dayah* dengan kemandirian finansialnya, di lapangan

⁶Arif Rohman, *Politik Ideologi Pendidikan* (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), 3.

⁷Edward Steven dan George H. Wood, *Justice, Idiologi and Education: An Introduction to The Social Fundation of Education* (New York: Random House, 1987), 149.

⁸Saifuddin Duhri, “Dayah dalam Tiga Phase Perkembangan (Menelaah Pendidikan Berbasis Perubahan Sosial yang telah Punah), *Sarwah*, Vol, IX, No. 1, 2011, hal. 166.

⁹Almuhajir, “Manajemen Dayah: Realita, Problematika, dan Cita-cita”, *Tribakti*, 23 (2, 2012), 187.

(penulis menyebutkan) akan kita dapatkan *Dayah* bonafit¹⁰, *Dayah* stagnan¹¹, dan *Dayah* hidup segan mati tak mau¹².

Berangkat dari fenomena ini, berawal dari era reformasi, era “Gerakan Aceh Merdeka”, dan pasca UUPA, para perangkat *Dayah* angkat bicara tentang kondisi pendidikan di Aceh. Mengapa ketika berbicara tanggung jawab moral generasi Aceh diberikan beban kepada *Dayah*, sedangkan ketika menikmati “pembangunan” daerah, *Dayah* tidak diikutsertakan, sehingga terjadi anak tiri dalam kebijakan pendidikan di Aceh.

Atas sikap yang ditunjukkan oleh para perangkat *Dayah* tersebut, akhirnya Pemerintah Aceh mengakomodir keinginan *Dayah* untuk dimasukkan dalam berbagai kebijakan pendidikan (dengan berbagai syarat), diantaranya adalah alumni *Dayah* boleh melanjutkan ke lembaga formal berikutnya (PTAI)¹³, dimasukkannya bantuan pendidikan untuk *Dayah* dengan dibentuknya sebuah lembaga yang khusus menangani *Dayah* yaitu Badan Pembinaan Pendidikan *Dayah* Aceh (BPPDA), serta dibolehkannya alumni *Dayah* untuk masuk menjadi anggota militer (Polri /TNI)¹⁴.

Di tengah keinginan berbagai pihak untuk melakukan legalisasi pendidikan *Dayah* agar setara dengan pendidikan lainnya, gayung bersambut, pemerintah akhirnya mengeluarkan aturan yang menghapus diskriminasi *Dayah* dalam sistem pendidikan nasional, adalah UU Nomor 20 tahun 2003 sebagai cikal bakal payung hukum yang mengakui *Dayah* sebagai salah satu lembaga pendidikan, ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang semakin memperkuat posisi *Dayah*.

¹⁰*Dayah* yang memiliki hubungan dengan penguasa/pemerintah, dengan mudah mendapatkan bantuan finansial.

¹¹*Dayah* yang tidak memiliki hubungan dengan penguasa, walaupun ada, tetapi bukanlah dengan orang-orang yang terpenting dalam pemerintahan, serta donatur bebas.

¹²*Dayah* yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan pemerintah, roda pendidikannya hanya mengandalkan sumbangan santri.

¹³Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang dibenarkan adalah prodi/jurusan/fakultas yang linear dengan kajian keilmuan ketika ada di *Dayah*, seperti Bahasa Arab, PAI, Ushuluddin, Dakwah, dan Syariah.

¹⁴Kepala Staf Kodam (Kasdam) Iskandar Muda, Brigjen TNI Iskandar M Sahil mengatakan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberi kesempatan luas kepada lulusan *Dayah* (pesantren) di Aceh untuk menjadi tamtama TNI. Bahkan dalam rekrutmennya akan diberikan jatah yang lebih besar untuk putra-putra Aceh. Hal itu diungkapkan Kasdam Iskandar Muda mewakili Pangdam saat presentasi para Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di Hotel Permata Hati, Aceh Besar, Sabtu, 15/9/2012. Lihat, <http://bangun-aceh.blogspot.com/2012/09/tentara-dari-alumni-Dayah-mengapa-tidak.html>, diakses tanggal 12 Juni 2014.

B. Pembahasan

1. Dayah dalam lintasan sejarah

Di Aceh, istilah untuk lembaga yang dikenal dengan sebutan pondok pesantren di Jawa dan berbagai tempat lainnya di Indonesia adalah *Dayah*. Kata *Dayah*, juga sering diucapkan dengan sebutan “*deah*” oleh sebagian orang Aceh, terutama di Aceh Besar.¹⁵

Terminologi ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu *Zawiyah*, yang berarti sebuah sudut, pojok atau kegiatan dari suatu tempat atau bangunan. Dalam perkembangannya, setelah mengalami adaptasi kultural kata *zawiyah* mengalami perubahan dialek dalam pengucapan orang Aceh, yaitu perubahan dari kata *zawiyah* menjadi *Dayah*. Sebab di Aceh dalam bahasa sehari-hari sering terjadi pertukaran dialek huruf Z menjadi huruf D.¹⁶ Secara genealogis, kata *zawiyah* ini pertama kali digunakan untuk penyebutan sudut mesjid Madinah ketika Nabi Muhammad saw. berdakwah pada masa awal Islam.¹⁷

Perkembangan *Dayah* di Aceh bila ditinjau dari beberapa penggalan sejarah perjalanannya mengalami resonansi, sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Berikut ini akan diuraikan sekilas perjalanannya, yang meliputi *Dayah* sebelum perang, *Dayah* pada masa perjuangan, *Dayah* pada masa kemerdekaan dan *Dayah* pada masa sekarang.¹⁸

Pertama, *Dayah* pada masa sebelum perang, yaitu pada 1873. Pada masa ini *Dayah* meliputi pendidikan di *meunasah-meunasah*, *rangkang*, *Dayah* Teungku Chik sampai pada pendidikan al-Jami'ah, seperti Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Keberadaan lembaga-lembaga seperti ini, dapat dilihat berbagai situs peninggalan sejarah, di antaranya *Dayah* teungku Awe Geutah di Peusangan, *Dayah* Teungku Chik di Tiro (Syekh Saman), *Dayah* Teungku Chik Tanoh Abee di Seulimum, *Dayah* Teungku di Lamnyong, *Dayah* Lambhuek dan *Dayah* di Krueng Kalee.

Kedua, *Dayah* pada masa perjuangan. Pada masa kolonialisme Belanda, setiap daerah (*nanggroe*) memiliki sekurang-kurangnya mempunyai sebuah *Dayah*,

¹⁵C. Snouck Hurgronje, *The Atjehnese*, terj. A.W.S. O'Sullivan, Vol. I (Leiden: J.Brill, 1906), 63.

¹⁶Rusdi Sufi, *Tgk. Hasan Krueng Kalee dan Teuku Nyak Arief, Profil Ulama dan Umara Aceh* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi NAD, 2006), 73.

¹⁷Mohd. Basyah Haspy, *Appresiasi terhadap Tradisi Dayah: Suatu Tinjauan terhadap Tata Krama dan Kehidupan Dayah* (Banda Aceh: Panitia Seminar Appresiasi Pesantren di Aceh Persatuan Dayah Inshafuddin, 1987), 7.

¹⁸Mashuri, “Dinamika Sistem Pendidikan Islam di Dayah”, *Didaktika*, 13 (2, 2013), 263-267.

Belanda kemudian merubahnya menjadi *landschap* yang jumlahnya 129 buah. Dengan demikian jumlah *Dayah* diperkirakan berjumlah 129 buah. *Dayah* pada masa ini memegang peranan penting dalam pengerahan tenaga pejuang ke medan pertempuran, terutama dalam mengobarkan semangat melalui pembacaan hikayat Perang sabil di *dayah-dayah*, *rangkang*, *meunasah* dan masjid. Di kala itu Aceh banyak kehilangan ulama-ulama besar dan kehilangan banyak sejumlah kitab-kitab besar dalam berbagai disiplin ilmu, baik yang ditulis oleh ulama Aceh sendiri maupun yang ditulis oleh ulama-ulama dari Timur Tengah.

Belanda juga mengontrol lembaga pendidikan apa saja yang berada di bawahnya. Mereka melarang mengajarkan beberapa mata pelajaran yang berhubungan dengan politik dan yang dianggap dapat memajukan kebudayaan ummat. Tinggallah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ibadah murni (utama) saja yaitu ilmu fiqh, tauhid dan tasawuf. Sedangkan bahasa Arab dan ilmu mantik hanya sebagai alat untuk mempertajam memahami ilmu fikih.

Ketiga, *Dayah* pada masa kemerdekaan, perkembangan *Dayah* --yang notabenehnya swasta-- pada masa ini sangat tersaingi oleh dua lembaga yaitu sekolah dan madrasah. Di samping itu sifat dari pendidikan *Dayah* yang dimiliki secara individual oleh ulama dirasakan agak sulit dalam pembinaan secara terorganisir. Mungkin akibat faktor inilah kemudian para ulama dan pimpinan *Dayah* seluruh Aceh berkumpul di Seulimum Aceh Besar pada 1968, sehingga berhasil mendirikan sebuah organisasi Persatuan *Dayah* Inshafuddin, sebagai suatu organisasi yang bergerak dalam melestarikan dan mengembangkan pendidikan *Dayah* di Aceh.

Keempat, *Dayah* pada masa sekarang. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa *Dayah* dewasa ini telah mengalami perkembangan, di samping *dayah-dayah* model tradisional juga muncul *dayah-dayah* model terpadu (modern), mulai dari tingkat Tsanawiyah (SMP), Aliyah (SMA) sampai membuka Perguruan Tinggi seperti STAI Aziziyah Samalanga.

2. Dayah dan masyarakat Aceh

Di Aceh, gerakan sosial politik, penciptaan kohevisitas sosial, kelahiran, kematian, pemikiran, membuka usaha, bernazar, sakit sampai dengan kehilangan sesuatu barang melibatkan *Dayah* dan *Teungku*¹⁹ *Dayah* sebagai pemimpin dan

¹⁹Teungku merupakan panggilan masyarakat Aceh terhadap orang yang memiliki pemahaman agama, kalau dalam bahasa Indonesia sederajat dengan Ustadz.

POLITIK PENYETERAAN DAYAH DI ACEH

rujukan dalam prosesi dan realisasinya. Sejak dari dulu di Aceh, agama dan politik tidak mengalami pemisahan yang tegas, sehingga antara teungku *Dayah* sebagai ulama dan sultan sebagai pemimpin politik saling bersimbiosis dalam menjalankan pemerintahan, bahkan ketika pemimpin politik mengalami krisis mereka (teungku *Dayah*) tampil ke ruang politik menggantikan peran yang terakhir dalam mempertahankan negara.²⁰

Hubungan yang akrab antara *Dayah* dengan masyarakat, menempatkan *Dayah* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat Aceh. Di sinilah karakter keberislaman mereka dibentuk, tempat anak-anak muda memperoleh status terhormat di masyarakatnya, tempat pengingatan bagi mereka yang merasa telah menjauh dari ajaran-ajaran agama Islam, dan Teungku *Dayah* yang bertempat tinggal di *Dayah* adalah “Ibu” bagi masyarakat Aceh yang senantiasa melindungi dan mengarahkan mereka tidak hanya pada masalah-masalah keagamaan tetapi juga sosial-politik. Hal ini membuat keberadaan mereka menjadi figur dan agen sosial yang sangat berwibawa dan menentukan dalam masyarakat Aceh.²¹

Berdasarkan kenyataan ada empat kegunaan *Dayah* dalam perjalanan sejarah bagi masyarakat Aceh, antara lain:²²

a. *Dayah* Sebagai Pusat Belajar Agama dan Cendikiawan.

Pada abad ke-17, ketika masa Kerajaan Islam Aceh, Aceh menjadi pusat kegiatan intelektual. Selama abad ini, beberapa sarjana dari negara lain datang untuk belajar ke Aceh. Seorang ulama terkenal Syekh Muhammad al-Makkasari (1626-1699), salah seorang ulama tersohor di waktunya itu di kepulauan Melayu, pernah belajar di Aceh. Syekh Burhanuddin dari Minangkabau yang kemudian menjadi ulama terkenal dan menyebarkan Islam di Ulakan mendirikan surau di Minangkabau, juga pernah belajar di Aceh di bawah bimbingan Syekh ‘Abd al-Rauf al-Singkili.

Pada masa selanjutnya, ketika terjadi kemunduran dalam bidang ekonomi dan politik di Kesultanan Aceh, perhatian ulama Aceh dengan ilmu-ilmu agama tidak berkurang. *Dayah* melanjutkan memenuhi kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan. Sebelum kedatangan Belanda, *dayah-dayah* di Aceh masih sering dikunjungi oleh masyarakat dari luar Aceh. Daud al-Fatani dari Pattani (sekarang

²⁰Nirzalin, “Krisis Agensi Politik Teungku Dayah di Aceh”, *Disertasi* (Yogyakarta: FISIPOL UGM, 2011), 13.

²¹*Ibid.*

²²Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah: Pengawal Agama Masyarakat Aceh* (Lhokseumawe: Nadiya, 2007), 58.

satu wilayah di Thailand) yang kemudian dikenal sebagai ulama terkemuka, murid Muslim dari Asia Tenggara di Mekkah juga pernah mengunjungi Aceh sekitar tahun 1760-an. Dia belajar di Aceh selama dua tahun dengan Muhammad Zain al-Faqih Jalal al-Din al-Ashi.

b. Peran *Dayah* dalam Melawan Penetrasi Penjajah

Ketika Belanda ke Aceh, terdapat beberapa *Dayah* yang telah berdiri di kawasan tersebut. Ketika Perang meletus, *Dayah* memainkan peranan penting dalam perlawanan rakyat Aceh. Sultan dan para uleebalang tidak sanggup menjalankan kepemimpinan, jadi para tentara ingin pemimpin lain untuk melanjutkan perlawanan dalam rangka mempertahankan tanah air mereka. Hal ini menunjukkan bahwa *Dayah*, apa pun bentuk namanya di tempat lain, telah menjadi pusat perlawanan dalam menghadapi penetrasi penjajah. Hal serupa juga terdapat di Pattani, Thailand, *zawiyah* menjadi pusat latihan bagi para kesatria untuk mencapai kemerdekaan.

Apa yang terdapat dalam Hikayat Prang Sabi, yang menjadi suatu kekuatan yang membangkitkan semangat rakyat Aceh terjun ke perang suci untuk mempertahankan tanah Aceh merupakan salah satu indikasi lain yang menjelaskan keterlibatan ulama *Dayah* dalam perang ini. Dalam konteks ini, indikasi pertama menyatakan bahwa Hikayat Prang Sabi disusun dalam bahasa Aceh yang sering dipakai oleh ulama *Dayah*. Dalam hal ini, dalam satu *Dayah* biasanya dipakai tiga bahasa, yaitu bahasa Aceh, Melayu, dan Arab.

c. *Dayah* Sebagai Agen Pembangunan

Dayah telah banyak mengabdikan kepada rakyat Aceh terutama dalam hal menghasilkan pemimpin masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan agama. Orang-orang tersebut telah memainkan peran yang penting dalam membina komunitasnya dalam bidang keyakinan dan praktik agama. Meskipun demikian, *Dayah* juga mendapatkan kritik oleh para intelektual karena hanya menghasilkan lulusan dalam bidang agama dan tidak ada keahlian lain yang berguna.

Beberapa *Dayah* mencoba untuk mengajarkan berbagai keahlian bagi murid mereka. Bagaimanapun, inisiatif ini masih berada pada tahap terbatas. Beberapa program tidak diatur dengan baik, bahkan insidental, dan jenis keahlian yang dilatih pun masih tergantung pada tenaga pengajar yang tersedia. Pada bagian lain, beberapa lulusan *Dayah* menjadi pemimpin formal yang duduk di kursi pemerintahan; di lain pihak ada juga yang menjadi pemimpin informal. Biasanya mereka aktif dalam pembangunan masyarakat. Tradisi ini berlangsung sampai hari ini, meskipun lulusan

POLITIK PENYETERAAN DAYAH DI ACEH

dari lembaga pendidikan lain (madrasah dan lembaga pendidikan umum) juga aktif dalam kehidupan masyarakat.

d. *Dayah* sebagai Lembaga pendidikan bagi Masyarakat

Belajar di *Dayah* tidak membutuhkan banyak uang. Inilah yang menjadi faktor penting bagi masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu. Rakyat bisa belajar di *Dayah* meskipun sangat miskin. Umumnya, *Dayah-Dayah* tidak membebankan murid-murid untuk membayar uang pendidikan.

Bagi murid yang fakir miskin, *Dayah* dengan sendirinya menyediakan makan, yang oleh Teungku (pimpinan *Dayah*) atau dari masyarakat selalu siap membantu. Dewasa ini, jika beberapa *Dayah* meminta biaya pendidikan biasanya tidak terlalu banyak. Murid-murid yang tidak punya uang biasanya bekerja di sawah atau kebun milik *Dayah* atau tinggal di tetangga-tetangga *Dayah*.

3. Simbiosis Mutualisme *Dayah* dan Pemerintah

Setiap *Dayah* yang di dalamnya ada Teungku atau Ulama, jelas sebagai pusat pertumbuhan dan pengetahuan Islam. Tapi bagaimanapun, lembaga *Dayah* juga merupakan tempat komunikasi sosial bahkan kadang kala juga menjadi lembaga kontrol sosial terhadap kekuasaan.²³

Dilihat dari sejarah dan peranannya, ternyata *Dayah* mengambil peran yang sangat signifikan dalam membangun Aceh, bahkan negara ini. Betapa tidak, perjuangan bangsa ini dalam memerdekakan negara ini pada umumnya dimulai/berangkat dari *Dayah* (khusus Aceh), dari sanalah semangat perjuangan berkobar untuk mengusir penjajah. Maka sangatlah wajar jika pemerintah sekarang baik pusat maupun daerah memperhatikan secara “spesial” pendidikan *Dayah*.

Pemerintah Aceh satu provinsi di Indonesia yang mengurus pendidikan pesantren (*Dayah*), yang dikendalikan oleh Badan Pendidikan dan Pembinaan *Dayah* (BPPD) Provinsi atau Kabupaten/Kota. Sedangkan pendidikan umum (SLTA/MA) dikendalikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota. Saat pendidikan umum mengalami degradasi, Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Zaini-Muzakkir memiliki peluang untuk memperkuat dan mengawal pendidikan di Aceh melalui pendekatan pendidikan *Dayah*.

²³Hasbi Amiruddin, *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh* (Yogyakarta: Polydoor, 2009), 104.

Pendidikan *Dayah* harus diperkuat dari segi administrasi organisasi secara menyeluruh. Pelibatan masyarakat harus benar-benar didukung dalam upaya eksistensi pendidikan *Dayah* di Aceh. Pendidikan *Dayah* di Aceh memiliki peluang menjadi jalur pendidikan alternatif setelah pendidikan umum terbukti gagal dalam memproduksi manusia-manusia yang cerdas dalam segala hal. Namun, peluang menjadikan pendidikan *Dayah* sebagai pendidikan alternatif belum direspons secara bijak oleh pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan *Dayah* di Aceh tidak memiliki *grand desain*.

Program intervensi terhadap eksistensi pendidikan *Dayah*, kalau diteliti lebih jauh justru menjadikan pendidikan *Dayah* sebagai pendidikan sub ordinat. Di mana pada akhirnya menjadikan pendidikan *Dayah* tidak jauh berbeda dengan pendidikan umum di Aceh. Sebagai bukti, bahwa tidak ada *grand desain* pendidikan *Dayah* di Aceh, berikut penulis tampilkan beberapa catatan menyangkut program yang pernah dilakukan pemerintah Aceh terhadap pendidikan *Dayah*:²⁴

Pertama, tentang kebijakan klasifikasi *Dayah*. Melalui serangkaian Peraturan Gubernur (Pergub) pada 2003, periode Abdullah Puteh, kemudian diperbaharui oleh Irwandi Yusuf melalui intruksinya pada tahun 2008 dimana salah satu poinnya adalah untuk melakukan klasifikasi pendidikan *Dayah* di Aceh secara komprehensif dan profesional melalui tipikal *Dayah* bertipe A, B, C dan nontipe²⁵. Fase inilah cikal bakal awal intervensi pendidikan *Dayah* oleh Pemerintah Aceh.

Kedua, menyangkut dengan registrasi jumlah *Dayah*. Kebijakan ini juga melalui Pergub No.451.2/474/2003. Poin yang utama adalah registrasi *Dayah* dilakukan setiap tiga tahun sekali, melalui dana dari APBD. Pada 2008 juga hal serupa dilakukan untuk penggunaan anggaran kepada pembangunan sarana dan prasarana *Dayah* melalui instruksi Gubernur yang dijalankan oleh BPPD dengan kewajiban melakukan koordinasi dengan dinas-dinas teknis terkait.

Ketiga, menyangkut kebijakan pemberian bantuan kepada *Dayah*. Pada 2003-2007 pemberian bantuan kepada *Dayah* dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, melalui Subdin *Dayah*. Pada 2008 wewenang itu menjadi milik BPPD Aceh berdasarkan Qanun No.5 Tahun 2007. Kemudian keluar instruksi Gubernur Irwandi

²⁴Mukhlisuddin, *Serambi Indonesia*, 23 Juli 2013.

²⁵ Tipikal *Dayah* didasari oleh beberapa indikator antara lain status tanah, kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga kependidikan, santri, dan finansial. Dimana ketentuan tipikal *Dayah* akan diputuskan dalam rapat BPPDA. Tipikal *Dayah* ini salah satunya akan berimbas kepada jumlah bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah Aceh.

POLITIK PENYETERAAN DAYAH DI ACEH

Yusuf, No.03/INSTR/2008 yang ditujukan kepada BPPD Provinsi, tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana *Dayah*/pesantren, menyebutkan bahwa pemberian bantuan dan pengembangan dengan sistem kerja sama dan mengutamakan kepentingan santri dan masyarakat sekitar *Dayah*. Jenis bantuan yang diberikan, meliputi pembangunan musallah, asrama, masjid, wc, dan bangunan utama pengajian.

Ada beberapa program jangka pendek yang dilakukan Pemerintah seperti pelatihan komputer untuk santri *Dayah*, pelatihan *life skill* santriwati (konveksi), pelatihan *life skill* satriwan (reparasi elektronik), bantuan untuk kegiatan ekstra kurikuler santri, *musabaqah qirawatil kutub* dan sayembara baca kita kuning, pelatihan jurnalistik santri serta pembinaan dan pengembangan kurikulum *Dayah*.

Program-program yang telah dirancang tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan *Dayah* di Aceh melalui BPPDA, baik sumber daya manusia guru *Dayah* dan juga santrinya, upaya ini ditempuh karena seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya peranan pendidikan agama dalam membentuk prilaku manusia, terutama generasi muda. Disamping itu juga sekarang pihak *Dayah* telah membuka diri untuk menerima perubahan dan perbaikan untuk kemajuan dari institusi *Dayah* sendiri, banyak program yang digulirkan diikuti oleh pihak *Dayah* dengan serius.

Gayung telah bersambut, kebijakan pemerintah yang menghapus diskriminasi *Dayah* sudah diterbitkan, sementara *Dayah* sendiri sudah siap untuk mengembangkan diri, tinggal bagaimana mengisi peluang itu dengan kerja nyata demi kemajuan pendidikan di masa yang akan datang.

4. Landasan Hukum, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan BPPDA

Badan Pembinaan Pendidikan *Dayah* (BPPD) Aceh berdiri pada tahun 2008. Badan Pembinaan *Dayah* ini memiliki tugas pokok melakukan pembinaan terhadap *Dayah-Dayah* yang ada di Aceh. Dasar pembentukan badan ini berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006, Qanun No. 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh.²⁶

²⁶<http://www.peristiwa.co/sejarah-pembentukan-badan-pembinaan-pendidikan-Dayah-aceh.html>, diakses tanggal, 10 Juni 2014.

Badan ini juga bekerja secara maksimal untuk meningkatkan mutu dan kualitas *Dayah*, baik prasarana, kurikulum *Dayah*, membantu merubah manajemen *Dayah* dan peningkatan kualitas santri serta memberdayakan *Dayah* sesuai dengan letak geografis *Dayah*. Badan ini memiliki beberapa program prioritas seperti pembentukan dan pengembangan Ma'had 'Ali, akreditasi *Dayah*, peningkatan profesionalisme manajemen *Dayah*; dan peningkatan kompetensi guru. Kehadiran lembaga ini di sambut dengan sangat senang oleh abu-abu *Dayah*. Pasalnya, sebelum BPPD dibentuk, *Dayah* termarginalisasi, baik secara fungsional dimana *Dayah* terkesan masih sangat tradisional maupun secara struktural, dimana *Dayah* kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Sesuai Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bahwa Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Badan Pembinaan Pendidikan *Dayah* Aceh adalah sebagai berikut:²⁷

a. Tugas Pokok BPPD Aceh adalah:

- 1) Pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
- 2) Pelaksanaan fasilitasi usaha ekonomi produktif;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar;
- 4) Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya santri;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan pendidikan *Dayah*;
- 6) Pembinaan unit pelaksana teknis badan (UPTB).

b. Fungsi BPPD Aceh adalah:

- 1) Pelaksanaan urusan ketata-usahaan badan;
- 2) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- 3) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan pendidikan *Dayah*;
- 4) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan pendidikan *Dayah*;
- 5) Penyiapan rancangan qanun dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pembinaan pendidikan *Dayah*.

c. Kewenangan BPPD Aceh adalah:

- 1) Mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan *Dayah* serta menambah materi muatan lokal;
- 2) Mengembangkan dan mengatur lembaga pendidikan *Dayah*;
- 3) Menetapkan kebijakan tentang penerimaan santri dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
- 4) Menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan *Dayah*;
- 5) Membantu penyelenggaraan *Dayah* yang meliputi pembinaan kurikulum, akreditasi dan fasilitas kesejahteraan tenaga pengajar;

²⁷*Ibid.*

POLITIK PENYETERAAN DAYAH DI ACEH

- 6) Menyelenggarakan pelatihan, penataran dan kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas tenaga pengajar;
- 7) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pengajaran *Dayah*;
- 8) Melakukan inventarisasi aset dan keberadaan lembaga *Dayah*;
- 9) Mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang pendidikan *Dayah*.

5. Problematika Pengakreditasi *Dayah*

Kalangan ulama menolak rencana Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengakreditasi (pengakuan status) bagi Pondok Pesantren (Ponpes/*Dayah*) jika dilakukan tanpa melibatkan para ulama setempat.²⁸ Sebelumnya, Wakil gubernur Muhammad Nazar menyatakan akan mengagredasi sebanyak 1.167 buah *Dayah* di seluruh Aceh.

Faisal Aly, Sekretaris Himpunan Ulama *Dayah* Aceh (HUDA), menyatakan pihaknya tidak menolak akreditasi lembaga pendidikan agama (*Dayah*) yang akan dilakukan pemerintah melalui lembaga independen, tapi harus ada keterlibatan aktif para ulama dan pimpinan pondok pesantren di dalamnya. Karena, tambah dia, yang lebih tahu kondisi dan masalah internal Ponpes/*Dayah* itu adalah ulama dan para pimpinan lembaga pendidikan agama (Islam) sendiri. Kalau ulama tidak dilibatkan di dalam proses akreditasi maka sangat dikhawatirkan terjadi penilaian yang salah terhadap *Dayah*/Ponpes itu sendiri.²⁹

Namun semangat juang yang luar biasa dari para santri *Dayah* masih direspon dingin oleh dunia kerja, ribuan lembar ijazah yang dikeluarkan *Dayah* di Aceh belum diterima oleh lapangan kerja. Sangat disayangkan setelah bertahun-tahun menuntut ilmu tidak mendapat pengakuan berarti dari pihak terkait, sehingga menjadi dilema baru bagi intelektual *Dayah* tersebut, bahkan untuk melanjutkan kuliah saja belum semua perguruan tinggi menerimanya. Kondisi ini menjadi kontra produktif sehingga berbagai pihak harus mencari solusinya.

Akreditasi merupakan salah satu penyebabnya, sehingga upaya untuk mengakreditasi *Dayah* hendaklah dilakukan secara cepat dan serius dengan melibatkan berbagai pihak supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Proses akreditasi tersebut akan menjadikan *Dayah* setara dengan pendidikan umum lainnya, sehingga persoalan diskriminasi ijazah tidak lagi terjadi. Pihak *Dayah* sendiri pada

²⁸Harian *Pelita*, 29 Agustus 2008.

²⁹ *Ibid.*

prinsipnya siap menyahuti proses tersebut selama tidak menghilangkan ciri khas mereka sendiri. Hal ini sebagaimana diungkapkan Waled Hasanoel Bashry HG, Pimpinan *Dayah* MUDI MESRA:³⁰

“Kalau konsep yang telah kami buat ini disetujui oleh pemerintah, hal tersebut mungkin bisa-bisa saja. Ini harus terlebih dahulu kita sepakati bersama. Tapi kalau hanya sepihak saja dari pemerintah yang menyebabkan hilangnya kekhasan *Dayah* itu tersendiri, ini tidak dapat kita penuhi, ini tidak dapat kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat nantinya”

Akreditasi itu sendiri akan mengarah kepada standarisasi mutu dan kurikulum *Dayah* itu sendiri supaya ada keseragaman, tidak berjalan sendiri-sendiri, adanya kejelasan antara *Dayah*, diniyah, TPA dan lain-lain. Jika perlu diterbitkan SK tersendiri dari lembaga pemerintah supaya tidak membingungkan masyarakat.

C. Penutup

Eksistensi *Dayah* tidak bisa dilepaskan dari peran negara. Ranah kultural yang digeluti *Dayah* selama ini menjadi landasan yang sangat berarti bagi eksistensi negara khususnya daerah Aceh. Perjuangan *Dayah* baik secara fisik maupun secara kultural tidak bisa dihapus dari catatan sejarah Aceh. Kini generasi santri tersebut mulai memasuki jabatan-jabatan publik (pemerintah), baik eksekutif maupun legislatif yang dulunya hanya sebatas mimpi.

Landasan kultural yang ditanamkan kuat di *Dayah* diharapkan menjadi pengawal dalam implementasi berbagai tugas baik pada ranah sosial, ekonomi, hukum, maupun politik. Baik di lembaga pemerintahan maupun swasta yang konsisten, transparan, dan akuntabel. Kalau selama ini *Dayah* telah menyumbangkan seluruh dayanya untuk kepentingan masyarakat, maka harus ada simbiosis mutualisme antara keduanya. Sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian serius atas kelangsungan *Dayah*. Kalau selama ini *Dayah* bisa eksis dengan swadaya, maka eksistensi tersebut akan lebih maksimal apabila didukung oleh pemerintah dengan serius. Badan *Dayah* yang kini ada Aceh (BPPDA), bukan hanya sekadar menambah SKPA di jajaran Pemerintah Aceh, melainkan harus benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya dalam memajukan *dayah-dayah* yang ada di daerah ini.

³⁰ Mulyadi Nurdin, “Sejarah Baru *Dayah*”, Majalah *Santunan*, Edisi. 6, Juli 2010, 7.

POLITIK PENYETERAAN DAYAH DI ACEH

Oleh sebab itu, diperlukan revitalisasi relasi antara *Dayah* dan pemerintah yang selama ini berjalan apa adanya. Tapi di sini perlu digaris bawahi bahwa revitalisasi relasi antara pemerintah dan *Dayah* adalah relasi yang sebenarnya, bukan relasi yang hanya kepentingan waktu Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu) saja, yang berlomba-lomba mendatangi *Dayah*, mendekati pimpinan *Dayah* agar mulus perjalanannya menuju apa yang diinginkan, dan bahkan supaya mulus untuk duduk di periode selanjutnya. Sebaliknya dari unsur pimpinan *Dayah* sendiri atau dari kalangan *Dayah* yang membawa nama *Dayah* untuk menuju kepentingan kelompok dan pribadi demi ambisi meraih kekuasaan.

Dari serangkaian penjelasan di atas, ada tiga elemen yang saling keterikatan dalam menjaga eksistensi, stabilitas dan prospek lembaga pendidikan tertua di Aceh, yaitu :

- a. *Dayah*. Dengan kondisi atmosfir Pemerintah Aceh yang telah membuka keran untuk *Dayah* dan kontrol sosial dari masyarakat, maka dalam hal ini *Dayah* harus memanfaatkan momen ini untuk terus membenah diri dari berbagai aspek, agar cita-cita *Dayah* untuk menjadi lembaga formal dari tingkat ibtidaiyah sampai perguruan tinggi akan terwujud.
- b. Masyarakat. *Dayah* yang sudah mulai bangkit dengan “perjuangannya”, masyarakat harus terus menerus memberikan dukungan sesuai dengan kemampuannya, baik materiil maupun spiritual, dan sekaligus menjadi kontrol sosial. Karena tanpa adanya masyarakat mustahil *Dayah* bisa berkembang dengan baik.
- c. Pemerintah. *Dayah* yang merupakan warisan masyarakat Aceh, pemerintah Aceh yang menjadi salah satu komponen yang bertanggung jawab menjaga kelestariannya, harus tetap menjaga warisan ini dengan melakukan berbagai usaha agar *Dayah* tidak hilang ditelan derasnya arus globalisasi. Pemerintah yang telah memberikan perhatian terhadap *Dayah* agar terus ditingkatkan untuk masa yang akan datang, mulai dari masalah kurikulum, sarana dan prasarana, sampai kepada tingkat kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri. Diharapkan kedepan dengan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dan juga elemen-elemen yang lain, *Dayah* akan menjadi lembaga pendidikan yang unik di Indonesia bahkan di mancanegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Almuhajir. "Manajemen Dayah: Realita, Problematika dan Cita-cita". *Jurnal TRIBAKTI*, Vol. 23, No. 2, 2012.
- Amiruddin, Hasbi. *Ulama Dayah: Pengawal Agama Masyarakat Aceh*. Lhokseumawe: Nadiya, 2007.
- . *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh*. Yogyakarta: Polydoor, 2009.
- Dhuhri, Saifuddin. "Dayah Dalam Tiga Phase Perkembangan (Menelaah Pendidikan Berbasis Perubahan Sosial yang telah Punah)". *Jurnal SARWAH*, Vol, IX, No. 1, 2011.
- Edward Steven and George H. Wood. *Justice, Idiologi, And Education: An Introduction To The Social Fundation Of Education*. New York: Random House, 1987.
- Harian Umum *PELITA*, edisi rabu, 29/8/2008.
- Harian *Serambi Indonesia*, edisi, selasa, 23/7/2013.
- Haspy, Mohd. Basyah. *Appresiasi terhadap Tradisi Dayah: Suatu Tinjauan terhadap Tata Krama dan Kehidupan Dayah*. Banda Aceh: Panitia Seminar Appresiasi Pesantren di Aceh Persatuan *Dayah* Inshafuddin, 1987.
- Hurgronje, C. Snouck. "The Atjehnese". A.W.S. O'Sullivan (terj.), Vol.I, Leiden: J.Brill, 1906.
- Latif, Hamdiah M., "Tradisi dan Vitalitas Dayah (Kesempatan dan Tantangan)". *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, Vol.8, No.2, 2007.
- Mashuri. "Dinamika Sistem Pendidikan Islam di Dayah", *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, Vol. 13, No. 2, 2013.
- Nirzalin. "Krisis Agensi Politik Teungku Dayah di Aceh". *Ringkasan Desertasi*. Yogyakarta: FISIPOL UGM, 2011.
- Nurdin, Mulyadi. "Sejarah Baru Dayah". *Majalah Santunan*, Ed. 6, Juli 2010.
- Rohman, Arif. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009.
- Siegel, James. *The Rope of God*. Los Angeles: University of California Press, 1969.
- Sufi, Rusdi. *Tgk. Hasan Krueng Kalee dan Teuku Nyak Arief, Profil Ulama dan Umara Aceh*. Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi NAD, 2006.
- Sufi, Rusdi dan Agus Budi Wibowo. *Pendidikan di Aceh dari Masa ke Masa*. Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi NAD, 2009.

POLITIK PENYETERAAN DAYAH DI ACEH

Sirozi, Muhammad. *Politik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Sumber online

<http://aceh.tribunnews.com/2013/07/23/mengawal-pendidikan-Dayah>, diakses tanggal 12 Juni 2014.

<http://bangun-aceh.blogspot.com/2012/09/tentara-dari-alumni-Dayah-mengapa-tidak.html>, diakses tanggal 12 Juni 2014.

<http://www.peristiwa.co/sejarah-pembentukan-badan-pembinaan-pendidikan-Dayah-aceh.html>, diakses tanggal, 10 Juni 2014.